

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di masa saat ini, memiliki pengaruh cukup besar terhadap kehidupan baik individu maupun sekelompok individu. Seluruh kegiatan baik dalam bidang kesehatan, pemerintahan, industri, dan pendidikan sudah memanfaatkan teknologi dalam melakukan aktivitasnya [1]. Bila melihat segala dimensi kehidupan yang terkena pengaruh dari kehadiran internet, sektor bisnis merupakan salah satu sektor yang signifikan terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta memiliki kecekatan dalam perkembangannya [2]. Penggunaan *Information Technology* atau TI tentunya diperlukan oleh organisasi untuk kebutuhan bisnis di zaman berkembang seperti ini agar bisa tetap bertahan dan melakukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi.

Teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan. Dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh instansi seperti melakukan proses pencatatan maupun kepengurusan data-data, pemanfaatan teknologi dapat membantu memudahkan proses berjalannya operasional instansi. Hal ini dapat dilihat dalam proses operasional dalam bidang pengawasan maupun pelaporan seperti ketika pekerja melapor ke institusi apabila ditemukan pelanggaran hak yang dimiliki oleh pekerja. Dari proses tersebut dapat diukur dan diadakan proses evaluasi untuk mengetahui apakah teknologi yang digunakan dalam instansi sudah berjalan selaras dengan tujuan yang diinginkan instansi dan sesuai dengan standar. Dalam rangka mengetahui hal tersebut maka kali ini akan dilakukan pengukuran kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor.

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor merupakan kantor pemerintahan yang berdiri sejak tahun 2017. Sebelumnya kantor pemerintahan ini lebih dikenal dengan nama Balai

Pelayanan Pengawasan sebelum berganti nama menjadi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor di tahun 2018. Instansi ini merupakan salah satu instansi pemerintah yang melakukan tugas pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan. Visi dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor sendiri yaitu adalah terwujudnya tenaga kerja dan transmigran yang maju dan sejahtera [3]. Salah satu perwujudan visi tersebut yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional sehari-hari instansi ketika melakukan pelayanan dengan menyediakan kesempatan melakukan pelaporan bagi tenaga kerja secara digital.

Namun dalam kenyataannya, penerapan tata kelola teknologi informasi pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor masih menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diatasi seperti wujud kebutuhan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang baik dalam penanganan teknologi informasi serta masih kurangnya integrasi antar departemen TI dengan bisnis. Hal-hal tersebut berdampak pada ketidakpuasan klien ketika melakukan pelaporan maupun dari tim departemen TI terhadap departemen bisnis.

Dalam bisnis, tentunya penggunaan TI ini diperlukan strategi dan manajemen yang baik agar penggunaan TI bisa diselaraskan dengan tujuan dan kebutuhan bisnis dari organisasi. Dalam instansi ketenagakerjaan, manajemen ini belum berjalan sesuai harapan dengan adanya keengganan dalam penerimaan TI. Penggunaan TI atau sebagai teknologi informasi ini diperlukan dari mekanisme *good governance* sehingga kontrol proses dan pelaksanaan layanan di instansi dijalankan secara lebih efektif dan efisien sehingga TI dapat membantu memenuhi tujuan instansi [4]. Tata kelola TI dapat berjalan dengan baik jika dengan penggunaan standar sudah terstandarisasi secara internasional sehingga dapat meningkatkan kontrol terhadap manajemen TI.

Penggunaan teknologi informasi (TI) kadang tidak sesuai dengan harapan, dimana investasi TI yang semakin besar ternyata tidak diikuti dengan dukungan yang semakin besar pula terhadap pencapaian tujuan dan strategi organisasi yang kemudian dikenal dengan “*productivity paradox*”. Oleh karena itu, diperlukan suatu tata kelola teknologi informasi yang terintegrasi dan terstruktur dimulai dari proses perancangan sampai dengan proses pengawasan untuk memastikan bahwa TI dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi [5]. Pencapaian nilai IT memerlukan kerangka kerja atau *framework* yang dapat mengelola tata kelola organisasi dan yang paling sering digunakan adalah COBIT dengan versi terbarunya yaitu COBIT 2019.

COBIT 2019 adalah kerangka kerja yang menyediakan prinsip, praktik, alat, dan model yang diterima secara global untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai dari IT perusahaan [6]. Selain COBIT 2019, terdapat juga beberapa *framework* lain untuk tata kelola IT seperti ITIL dan COBIT 5. COBIT 5 adalah *framework* yang dibuat oleh ISACA pada tahun 2012 untuk memberi panduan dan alat kepada organisasi untuk membantu mereka membangun tata kelola TI yang efektif, mengurangi risiko terkait TI, dan meningkatkan kontrol TI. Pada *framework* lain yaitu ITIL (Information Technology Infrastructure Library) adalah *framework* yang menyediakan seperangkat prinsip dan praktik untuk manajemen layanan. ITIL dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan TI mereka dengan memberikan panduan tentang beberapa proses di dalamnya.

Berdasarkan beberapa pilihan *framework* yang tersedia, COBIT 2019 akan digunakan untuk melakukan penilaian kapabilitas untuk mengetahui tingkat keselarasan tujuan teknologi informasi dan tujuan organisasi. COBIT 2019 juga dipilih untuk membantu menyelaraskan layanan TI sesuai dengan tingkat yang diinginkan oleh instansi pemerintahan di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor berdasarkan kondisi serta tujuan yang ingin dicapai instansi saat ini. COBIT 2019 dipilih sesuai dengan *tools* yang digunakan dalam penelitian yaitu COBIT *Design Toolkit* yang dipakai untuk

menentukan ruang lingkup dan desain sistem tata kelola pada tahap penentuan objektif proses pada COBIT.

Maka dari itu akan dilakukan pengukuran kapabilitas pada tata kelola TI sistem pelaporan menggunakan COBIT 2019 pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor untuk menanggulangi masalah yang terjadi pada instansi dan mendukung tata kelola TI. Pengukuran kapabilitas akan dilakukan lewat identifikasi masalah, observasi, melakukan wawancara, serta pengisian kuesioner agar dapat menghasilkan audit rekomendasi yang tepat dan berkualitas. Diharapkan dengan dilakukannya audit rekomendasi serta evaluasi tata kelola teknologi informasi dari hasil pengukuran yang pertama kali diterima pada instansi ini, dapat menjadi kesempatan untuk instansi berbenah diri dalam bidang pemanfaatan tata kelola teknologi informasi dan membantu mencapai visi misinya juga menjadi fondasi bagi pihak lain yang ingin melakukan audit kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijabarkan, penelitian ini menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil evaluasi mengenai tata Kelola TI yang berlangsung saat ini berdasarkan framework COBIT 2019 menggunakan COBIT toolkit?
2. Bagaimana tingkat kapabilitas tata Kelola teknologi informasi pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor serta Teknik pengukurannya yang diukur menggunakan *framework* COBIT 2019?
3. Bagaimana rekomendasi yang pantas dengan kebutuhan instansi bila didasarkan dari hasil pengukuran level kapabilitas dalam pengembangan tata kelola teknologi informasi?

1.3 Batasan Masalah

Demi menjaga cakupan penelitian dan agar tidak beralih dari rumusan masalah yang dibuat, maka dibuatlah batasan masalah yang dijadikan objek penelitian. Berikut beberapa Batasan masalah dalam penelitian:

1. Pemetaan ruang lingkup pengukuran kapabilitas TI menggunakan pendekatan perspektif proses bisnis dengan berpatokan pada pedoman COBIT 2019.
2. Pengukuran keselarasan antara tujuan bisnis dan tujuan teknologi informasi pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor dilakukan melalui pengukuran kapabilitas pada domain BAI03, BAI05, dan BAI07 menyesuaikan dengan hasil evaluasi dari COBIT *Design Toolkit*.
3. Tingkat keselarasan tujuan bisnis dan tujuan teknologi informasi instansi diwakilkan dengan nilai level kapabilitas.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setelah melihat latar belakang, terdapat tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan evaluasi mengenai tata kelola TI yang sudah ada berdasarkan framework COBIT 2019.
2. Mengukur level kapabilitas dari tata kelola TI di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor dengan menggunakan framework COBIT 2019.
3. Memberikan rekomendasi, temuan dan dampak, serta pengukuran kapabilitas di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang sudah dijabarkan, maka diolah menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Instansi dapat mengevaluasi dan mendapatkan hasil mengenai tata Kelola IT yang berlangsung saat ini berdasarkan framework COBIT 2019.
2. Instansi mendapatkan rekomendasi dari hasil evaluasi pada domain yang akan diselaraskan dengan permasalahan serta tujuan instansi.
3. Meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya tata Kelola IT.
4. Menambah pengetahuan mengenai tata Kelola IT pada instansi pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian penilaian kemampuan dari tata kelola TI sistem pelaporan memakai COBIT 2019 (Studi Kasus: UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor) disusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan: Di BAB I dijabarkan mengenai latar belakang permasalahan instansi, Batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II: Landasan Teori: Di BAB II dijabarkan mengenai landasan teori serta penelitian terdahulu.

Bab III: Metodologi Penelitian: Di BAB III dijabarkan mengenai gambaran objek dari penelitian, metodologi penelitian, variabel yang dipakai, cara mengumpulkan data, cara dalam mengambil sampel, serta cara untuk melakukan analisis data.

Bab IV: Analisis Dan Hasil Penelitian. Di BAB IV dijabarkan mengenai analisis juga hasil penelitian berdasarkan data dan sampel yang didapatkan.

Bab V: Simpulan dan Saran. Di BAB V dijabarkan mengenai kesimpulan terhadap penelitian serta saran untuk instansi.